

**PENGARUH DEMOKRASI, KEKUATAN POLITIK, DAN UKURAN
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI PEMERINTAH
DAERAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

SINDY PUTRI NUR RAHMADANNI

NIM: 18043047/2018

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

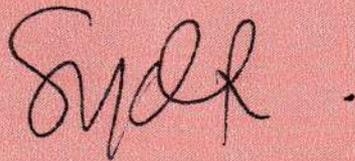
PENGARUH DEMOKRASI, KEKUATAN POLITIK, DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Nama : Sindy Putri Nur Rahmadanni
NIM / TM : 18043047 / 2018
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2022

Disetujui Oleh

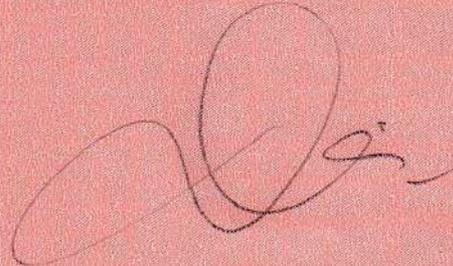
Ketua Departemen Akuntansi



Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D

NIP. 19800103 200212 2 001

Pembimbing



Dr. Deviani, SE, M.Si, Ak

NIP. 19690610 199802 2 001

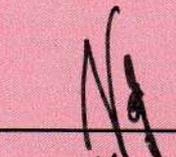
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Demokrasi, Kekuatan Politik, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Pemerintah Daerah di Indonesia
Nama : Sindy Putri Nur Rahmadanni
NIM / TM : 18043047 / 2018
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2022

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Dr. Deviani, SE, M.Si, Ak	1. 
2	Anggota	Vita Fitria Sari, SE, M.Si	2. 
3	Anggota	Herlina Helmy, SE, Ak, M.SA	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sindy Putri Nur Rahmadanni
NIM/Tahun Masuk : 18043047/2018
Tempat/Tgl. Lahir : Curup/ 12 Desember 2000
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Ahmad Marzuki, Curup, Bengkulu
No. HP/Telp : 089634075563
Judul Skripsi : Pengaruh Demokrasi, Kekuatan Politik, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Pemerintah Daerah di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Agustus 2022
Saya yang Menyatakan



Sindy Putri Nur Rahmadanni
18043047/2018

ABSTRAK

Rahmadanni, Sindy Putri Nur. 2022. “Pengaruh Demokrasi, Kekuatan Politik, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Pemerintah Daerah di Indonesia”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang. Pembimbing Dr. Deviani, SE., Ak., M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh demokrasi terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia. (2) Pengaruh kekuatan politik terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia. (3) Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Transparansi menggunakan hasil penilaian tingkat transparansi pemerintah daerah dari Komisi Informasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pemerintah provinsi di Indonesia. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 99 sampel untuk 3 tahun pengamatan (2018-2020). Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dengan teknik dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia, sedangkan kekuatan politik tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Secara simultan, demokrasi, kekuatan politik, dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia

Kata Kunci: Transparansi, Demokrasi, Kekuatan Politik, Ukuran Pemerintah Daerah

ABSTRACT

Rahmadanni, Sindy Putri Nur. 2022. “The Effect of Democracy, Political Strength, and Local Government Size of Local Government Transparency in Indonesia”. Thesis. Accounting Departement. Faculty of Economy. Universitas Negeri Padang. Advisor Dr. Deviani, SE., Ak., M.Si.

The aim of this study is to examine: (1) The effect of democracy of local government transparency in Indonesia. (2) The effect of the political strength of local government transparency in Indonesia. (3) The effect of local government size on local government transparency in Indonesia. Transparency is assessed from the result of transparency assessment on local government level from the Commission of Information for Indonesia (Komisi Informasi Indonesia). The study approach used is quantitative. The population in this study is all provinces in Indonesia. The number of samples in this study is 99 samples with 3 observation periods (2018-2020). This study used secondary data by documentation technique.

The analysis technique used is multiple linear regression analysis. Based on the result of this study indicates that democracy and local government size had a positive and significant effect of local government transparency in Indonesia, while political strength did not affect of local government transparency in Indonesia, Simultaneous test result shows that democracy, political strength, and local government size has significant effect of local government transparency in Indonesia.

Keywords: Transparency, Democracy, Political Strength, Local Government Size

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puji syukur penulis atas kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis diberikan kelancaran, kekuatan dan ketabahan hati dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Demokrasi, Kekuatan Politik, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Pemerintah Daerah di Indonesia” untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Dr. Deviani, SE, M.Si, Ak selaku dosen pembimbing atas semua arahan, masukan, saran, motivasi, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si dan Ibu Herlina Helmy, SE, M.SA, Ak selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D selaku Kepala Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas bagi penulis dalam menempuh S1 di Fakultas Ekonomi.
4. Yang paling utama, ucapan terima kasih dan rasa bangga penulis ucapkan kepada Ayah dan Ibu tersayang. Ibu yang selalu memberikan dukungan dan doa disetiap perjalanan dengan kasih sayang serta ketulusan hati yang tak pernah lelah mendengar setiap keluh kesah. Serta Ayah yang memberikan

pelajaran dan kekokohan prinsip yang tegas dan mandiri dalam menjalani kehidupan. Berkat doa Ayah dan Ibu sehingga semua langkah penulis dapat dijalani dengan baik. Semoga segala doa baik yang Ayah dan Ibu panjatkan dapat mengantarkan penulis pada kesuksesan yang sebagaimana diharapkan oleh Ayah dan Ibu.

5. Teruntuk saudara saya tercinta, Bang Rio, Aldo, Yuk Na, Uni Novi terima kasih atas dukungan baik moril maupun materil dan doa yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proses perkuliahan ini.
6. Deby Nofrizaldi, seseorang yang telah menjadi teman, sahabat dan pendamping. Terima kasih telah menemani penulis sedari awal kuliah hingga akhirnya penulis bisa sampai di tahap ini. Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis, serta mendukung hal baik yang penulis lakukan. Semoga suatu saat kita bisa mewujudkan cita-cita yang telah diimpikan selama ini aamiin.
7. Ara, Putri, Belva dan Taher terima kasih telah menjadi sahabat yang baik semasa kuliah yang memberikan semangat dan dukungan. Semoga suatu saat kita bisa membanggakan keluarga dan mencapai impian yang kita harapkan selama ini.
8. Yona, Salsa, Vira, Aisyah, Valen, Intan, Yuyun, dan Kuntum terima kasih telah menjadi teman pertama penulis selama di perkuliahan. Terima kasih untuk perjuangan dan kebersamaan selama empat tahun ini.

9. Sahabat-sahabat penulis, Anti, Nada, Aulia, Tascha, dan Novri yang selalu menyemangati penulis meskipun kita berada di kota yang berbeda. Mudah-mudahan kita sukses bersama.
10. Marsel dan Dinda, sahabat penulis yang sudah menjadi pendengar setia penulis sedari awal kuliah. Semoga tercapai cita-cita kita untuk membanggakan kedua orang tua.
11. Nadia dan Ima, teman kos sedari awal perkuliahan yang banyak memberikan dukungan, semangat, serta cerita suka duka selama masa perkuliahan dan diperantauan.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang penulis susun ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Atas segala kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis mengarapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk para pembaca dan peneliti lainnya. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Agustus 2022

Sindy Putri Nur Rahmadanni

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kajian Teori	12
1. Teori Agensi dalam Pemerintahan	12
2. Sistem Pemerintahan di Indonesia	15
3. Transparansi	17
4. Demokrasi	19
5. Kekuatan Politik	21
6. Ukuran Pemerintah Daerah	22
B. Penelitian Terdahulu	23
C. Pengembangan Hipotesis	29
1. Pengaruh Demokrasi	29
2. Kekuatan Politik	31
3. Ukuran Pemerintah Daerah	32
D. Kerangka Konseptual	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Jenis dan Sumber Data	35
C. Populasi dan Sampel	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Variabel Penelitian dan Pengukuran	37

1. Variabel Dependen (Terikat)	37
2. Variabel Independen (Bebas).....	40
a. Demokrasi.....	40
b. Kekuatan Politik	40
c. Ukuran Pemerintah Daerah.....	41
F. Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis	42
1. Analisis Statistik Deskriptif	42
2. Uji Asumsi Klasik.....	42
a. Uji Normalitas.....	43
b. Uji Multikolinearitas	43
c. Uji Heteroskedastisitas	44
d. Uji Autokorelasi.....	44
3. Analisis Regresi Linear Berganda	45
4. Uji Hipotesis	46
a. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	46
b. Uji Signifikan Simultan (Uji-F).....	46
c. Uji Parsial (Uji-t)	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian.....	48
1. Analisis Statistik Deskriptif	48
2. Uji Asumsi Klasik.....	48
a. Uji Normalitas.....	49
3. Analisis Statistik Deskriptif Setelah Eliminasi Outlier.....	51
4. Uji Asumsi Klasik Setelah Eliminasi Outlier	54
a. Uji Normalitas Setelah Eliminasi Outlier	54
b. Uji Multikolinearitas	54
c. Uji Heteroskedastisitas	56
d. Uji Autokorelasi.....	57
5. Analisis Regresi Linear Berganda	58
6. Uji Hipotesis	60
a. Koefisien Determinasi (R^2).....	60
b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	61

c. Uji Parsial (Uji-t)	61
B. Pembahasan	63
1. Pengaruh Demokrasi terhadap Transparansi Pemerintah Daerah di Indonesia	63
2. Pengaruh Kekuatan Politik terhadap Transparansi Pemerintah Daerah di Indonesia	65
3. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Pemerintah Daerah di Indonesia	67
BAB V PENUTUP.....	70
A. Simpulan	70
B. Keterbatasan Penelitian	71
C. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	23
Tabel 2. Ringkasan Definisi Operasional	42
Tabel 3. Statistik Deskriptif	48
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas	49
Tabel 5. Hasil Pengambilan Sampel dengan Data Outlier	51
Tabel 6. Statistik Deskriptif Setelah Eliminasi Outlier	51
Tabel 7. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	52
Tabel 8. Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov (K-S) Setelah Outlier	54
Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas	55
Tabel 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser	56
Tabel 11. Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson	57
Tabel 12. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	58
Tabel 13. Hasil Koefisien Determinasi (R ²)	60
Tabel 14. Hasil Uji Statistik F	61
Tabel 15. Hasil Uji Parsial (Uji-t)	62
Tabel 16. Simpulan Hasil Uji Hipotesis	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual 34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan undang-undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan bahwa seluruh badan publik, termasuk Pemerintah Daerah (pemda) untuk mempublikasikan informasi publik setiap kegiatan yang dilakukan. Lembaga yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang ini adalah Komisi Informasi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, transparansi merupakan prinsip terbuka dan jujur yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi atas pengelolaan sumber daya secara terbuka dan menyeluruh sebagai pertanggungjawaban pemerintah.

Transparansi penyelenggaraan pemerintah memiliki arti yang sangat penting dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Disamping sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, transparansi juga merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *good governance*. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan dapat ditumbuhkan (Tahir, 2011). Menurut da Cruz *et al.*, (2016) untuk meningkatkan tata kelola terhadap pelayanan publik diperlukan adanya transparansi yang akan memberikan jalan kepada masyarakat untuk mengetahui kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah.

Perkembangan perhatian pemerintah terhadap transparansi semakin gencar dilakukan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 yang berisikan agar Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk ikut berpartisipasi mendukung aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Agar transparansi dapat terwujud maka pemerintahan dapat menyampaikan informasi kepada publik melalui media agar mudah diakses oleh publik sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Dengan diterbitkannya aturan ini membuat informasi dapat diperoleh dengan mudah, cepat, dan dapat dilakukan dimanapun secara online yaitu dengan mengakses *website* resmi daerah masing-masing.

Teori agensi menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen. Dalam kerangka prinsipal-agen, pemerintah diberikan tugas untuk membuat informasi yang akurat dan relevan sehingga dapat diakses oleh masyarakat untuk menghilangkan masalah asimetri informasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan adanya transparansi dalam pemerintahan, maka akan mengurangi atau menghilangkan masalah asimetris dalam hubungan keagenan (Krah & Mertens, 2020).

Jensen & Meckling (1976) menyebutkan bahwa teori agensi menjelaskan hubungan yang timbul saat satu pihak (prinsipal) memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain (agen) untuk mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan prinsipal. Dalam hubungan masyarakat

dengan pemerintah, pihak prinsipal diperankan oleh masyarakat, sedangkan agen adalah pemerintah daerah. Dengan adanya teori agensi ini, maka masyarakat yang bertindak sebagai prinsipal harus terlibat secara langsung untuk mengawasi kegiatan pemerintah daerah (agen). Oleh sebab itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mempublikasikan dan menyajikan informasi secara transparan kepada masyarakat.

Adiputra *et al.*, (2018) menyatakan bahwa dalam pemerintahan yang demokratis, informasi keuangan yang berkaitan dengan dana yang dikumpulkan, dibelanjakan, dan diinvestasikan diungkapkan kepada publik memungkinkan masyarakatnya melakukan penilaian atas akuntabilitas pemerintah daerah. Peningkatan transparansi dibutuhkan untuk memenuhi fungsi pengawasan, mencegah tindakan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang akan berdampak pada pemborosan.

Salah satu bentuk transparansi yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah dengan mempublikasikan informasi keuangan melalui *website* resmi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah. Di Indonesia hampir seluruh pemerintah daerah telah memiliki *website* resmi, namun pemanfaatan *website* untuk keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah masih minim (Al Asyari & Helmy, 2020). Fenomena ini salah satunya terjadi di Sumatera Barat yang dijelaskan dalam penelitian Agustin (2014). Dalam risetnya ditemukan bahwa kesungguhan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dalam memanfaatkan *website* resmi masing-masing untuk mewujudkan transparansi pengelolaan anggaran daerah masih

sangat rendah. Dari 19 kabupaten/kota yang diteliti, hanya terdapat 9 kabupaten/kota yang menyediakan data transparansi pengelolaan anggaran daerah ataupun data lainnya di *website* resmi secara lengkap dan konsisten.

Penelitian Ritonga & Syahrir (2016) menunjukkan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah di 34 pemerintah provinsi di Indonesia masih sangat rendah, yaitu hanya sebesar 16,84%. Sebelum itu, Martani *et al.*, (2013) juga melakukan penelitian mengenai tingkat transparansi informasi keuangan dan kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Dari total 491 pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, hanya 429 *website* pemerintah daerah yang bisa diakses. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi informasi keuangan dan kinerja *website* resmi pemerintah daerah hanya sebesar 15%.

Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP) mengenai Keterbukaan Informasi Publik hingga saat sekarang belum berjalan sesuai harapan (Muhtar *et al.*, 2017). Meskipun telah diatur dalam undang-undang, namun masih banyak badan publik yang belum menyediakan informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP tersebut. Evaluasi transparansi badan publik, termasuk pemerintah daerah penting dilakukan untuk menjamin bahwa UU KIP telah dilaksanakan oleh Komisi Informasi.

Badan publik pemerintah provinsi belum sepenuhnya patuh terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 atau dikenal dengan UU KIP. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi pada tahun 2020

menunjukkan bahwa dari 34 pemerintah provinsi di Indonesia, hanya 10 pemerintah provinsi yang dikategorikan informatif, 5 pemerintah provinsi menuju informatif, 9 pemerintah provinsi cukup informatif, 3 pemerintah provinsi yang kurang informatif, dan 7 pemerintah provinsi yang tidak informatif.

Pengamat dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri (mediaindonesia.com 18/09/2017) menyatakan bahwa penyebab terhambatnya proses transparansi pemerintah daerah kemungkinan terjadi karena sulitnya mendapatkan informasi publik karena setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda-beda, memiliki tingkat kompleksitas, dan jenis masyarakat yang berbeda-beda pula. Masyarakat di beberapa daerah pun kurang diedukasi mengenai apa pentingnya mengetahui pengelolaan dan jalannya pemerintah secara transparan. Adanya transparansi berarti pemerintah mengajak masyarakat untuk dapat aktif bersama pemerintah dalam pembangunan di daerahnya. Transparansi yang dilakukan pemerintah daerah juga membuktikan bahwa pemerintah daerah sebagai penerima amanat telah menjalankan amanah yang diberikan masyarakat sebaik mungkin dan ingin terus dipercaya oleh masyarakat.

Pemerintah provinsi harus mempunyai pondasi yang kokoh dan kuat karena pemerintah provinsi mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dan juga sebagai wakil daerah di pemerintahan pusat. Tugas pemerintah provinsi dalam membuat regulasi dan membawa dampak perubahan yang positif, akan

membuat kota/kabupaten yang berada di bawah kendalinya pun juga akan mengikuti pola perilaku institusi yang berada di atasnya.

Penelitian ini dilakukan dengan periode pengamatan selama 3 tahun yaitu tahun 2018-2020 hal ini karena pemilihan kepala daerah 3 tahun terakhir terhitung dari tahun 2018 menjadi sorotan, dengan terpilihnya kepala daerah yang baru akankah membawa perubahan yang berarti bagi regulasi dan pembangunan daerah tersebut. Begitupun, dengan transparansi yang dilakukan oleh kepala daerah yang baru atau kepala daerah yang meneruskan jabatan akankah ada perubahan untuk melakukan transparansi pengelolaan keuangan yang lebih baik. Tahun 2018 merupakan tahun pemilihan kepala daerah (pilkada) terbesar yang dilakukan serentak oleh 17 provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018, sedangkan pilkada tahun 2017 yang digelar serentak tanggal 15 Februari 2017 diikuti oleh 7 provinsi di Indonesia. Kemudian, sisanya sebanyak 10 provinsi mengikuti Pilkada tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015.

Polemik yang terjadi akibat pergantian kepala daerah inilah yang menjadikan sorotan terhadap transparansi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintahan yang baru seakan terdesak untuk lebih transparan dibidang apapun. Pilkada besar-besaran terjadi pada tahun 2018 dan beberapa Gubernur yang baru saja dilantik sudah menjadi tangkapan KPK di tahun 2019. Gubernur provinsi Aceh, drh. H. Irwandi Yusuf merupakan gubernur yang meneruskan jabatan hingga periode 2 namun di awal periode 2-nya, Irwandi ditangkap KPK setelah terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan)

pada 3 Juli 2018. Hal ini juga terjadi pada Gubernur Bengkulu, Gubernur Jambi dan Gubernur Kepulauan Riau yang mana gubernur tersebut ditangkap KPK karena terjerat kasus korupsi di masa jabatannya menjabat sebagai Gubernur yang baru dilantik.

Relatif rendahnya transparansi publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia menjadi isu yang cukup *urgent* untuk diperbaiki, mengingat adanya media *website* yang memudahkan pemerintah daerah dalam mengungkapkan kinerjanya secara transparan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti transparansi pemerintah daerah melalui *website* pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan faktor yang mempengaruhinya agar selanjutnya dapat menghasilkan rekomendasi untuk mewujudkan transparansi pemerintah daerah yang lebih baik.

Faktor pertama yang mempengaruhi transparansi pemerintah daerah yaitu demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan yang penyelenggaraannya dilakukan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat. Transparansi dan partisipasi masyarakat sangat berkaitan erat, apabila partisipasi masyarakat tinggi, maka menunjukkan bahwa pemerintah mewujudkan transparansi yang baik karena masyarakat dapat menjalankan kewajibannya untuk terlibat dalam mengawasi dan mengevaluasi jalannya pemerintahan, selain itu keterbukaan informasi publik merupakan hak asasi dari setiap warga negara, maka dari itu, publik berhak memperoleh informasi, salah satunya mengenai proses kebijakan publik, anggaran, pengawasan, dan evaluasinya (ombudsman.go.id, 2020). Dengan adanya keterbukaan tersebut, masyarakat

dapat mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah serta menilai kesesuaian harapan dan kepentingan publik. Krah & Mertens (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa demokrasi berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah dan hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa demokrasi mampu meningkatkan transparansi (Bauhr & Grimes, 2014; Curtin & Meijer, 2006; Fairbanks *et al.*, 2007). Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa ketika demokrasi tumbuh di suatu negara, maka disposisi transparansi pemerintah daerah meningkat.

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi transparansi pemerintah daerah yaitu kekuatan politik. Kekuatan politik menunjukkan bahwa semakin kuat pengaruh dan dukungan partai politik akan menghasilkan lingkungan partai politik akan menghasilkan lingkungan partai yang kompetitif maka akan semakin besar pula tekanan pada pemerintah untuk melakukan transparansi (Dowley, 2006). Pemilihan kepala daerah tidak terlepas dari partai politik yang mengusungnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Menurut Dowley (2006) kepala daerah yang didukung oleh partai mayoritas atau partai pemenang dalam pemilu memperoleh perhatian yang besar dari masyarakat sehingga semakin sedikit ruang untuk pemerintah dalam menyembunyikan kegiatan pemerintah daerah, terutama yang penting seperti keputusan anggaran. Hal ini akan menimbulkan tuntutan dari masyarakat, di mana masyarakat mengharapkan informasi yang lebih baik sehingga mendorong adanya keterbukaan informasi yang lebih besar pula (Sutaryo & Tri Amanu, 2020). Penelitian yang

dilakukan oleh Tejedo-Romero & de Araujo (2015) dan Tavares & da Cruz (2017) menunjukkan pengaruh yang signifikan antara kekuatan politik dengan transparansi pemerintah daerah, namun penelitian yang dilakukan oleh Pranaswati & Kiswanto (2020) menunjukkan hasil bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kekuatan politik dengan transparansi pemerintah daerah.

Ukuran pemerintah daerah merupakan ukuran yang memperlihatkan besarnya aset yang dimiliki oleh suatu daerah. Nosihana & Yaya (2016) menyatakan bahwa aset dapat menggambarkan seberapa besar pemerintahan tersebut, semakin besar aset yang dimiliki menunjukkan bahwa semakin banyak juga modal yang ditanam. Hal tersebut berdampak pada pengawasan yang ketat dari masyarakat karena khawatir akan terjadinya penyelewengan dana oleh pemerintah daerah, sehingga transparansi pemda dibutuhkan untuk mengurangi asimetri informasi terhadap masyarakat. Krah & Mertens (2020) dalam penelitian menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah ditemukan berpengaruh positif terhadap transparansi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Nosihana & Yaya (2016) dan Trisnawati & Achmad (2013). Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Laswad *et al.*, (2005), Adiputra *et al.*, (2018), dan Wau & Ratmono (2015) yang menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah.

Berdasarkan ketidakkonsistenan pada hasil penelitian terdahulu dan fenomena yang terjadi mengenai faktor yang mempengaruhi transparansi

pemerintah daerah peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH DEMOKRASI, KEKUATAN POLITIK, DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik adalah:

1. Sejauh mana pengaruh demokrasi terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia?
2. Sejauh mana pengaruh kekuatan politik terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia?
3. Sejauh mana pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah menguji secara empiris tentang:

1. Pengaruh demokrasi terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia
2. Pengaruh kekuatan politik terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia
3. Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi akademisi, pemerintah, masyarakat, dan juga bagi penulis. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan literatur akuntansi sektor publik dengan menghubungkan demokrasi, kekuatan politik, dan ukuran pemerintah daerah dengan transparansi di pemerintah daerah

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai transparansi pemerintah daerah di Indonesia.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan tentang pentingnya menganalisis faktor yang mempengaruhi transparansi pemerintah daerah di Indonesia

c. Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan sebagai informasi dan menambah pengetahuan mengenai faktor yang mempengaruhi transparansi pemerintah daerah di Indonesia.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Teori Agensi dalam Pemerintahan

Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa dalam teori agensi, pihak prinsipal dan pihak agen membuat dan melaksanakan suatu kontrak atau kesepakatan dimana prinsipal dalam hal ini masyarakat memberikan tanggung jawab kepada pihak agen yaitu pemerintah daerah untuk melakukan pengambilan keputusan yang akan disetujui bersama.

Pada pemerintahan di Indonesia, pemerintah daerah berperan sebagai agen yang menyelenggarakan urusan pemerintah sesuai kepentingan masyarakat selaku prinsipal. Masyarakat selaku prinsipal memberikan amanat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Sedangkan pemerintah daerah selaku agen berkewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan pemerintahannya kepada masyarakat.

Pemerintah diberikan tugas untuk membuat informasi yang akurat dan relevan mengenai pengelolaan daerah kepada masyarakat. Masyarakat bertindak sebagai prinsipal yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan dan mengelola pemerintahan. Banker & Paxton (1987) dalam Wau & Ratmono (2015) menjelaskan bahwa pemerintah daerah selaku agen memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan yang berkaitan dengan penggunaan

sumber daya yang telah diamanatkan masyarakat dalam bentuk laporan keuangan.

Berdasarkan teori ini, hubungan antara pemerintah dan masyarakat sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan. Dalam hubungan keagenan dapat memunculkan *agency problem* berupa asimetri informasi yang mendorong terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Dalam hal ini pemerintah daerah cenderung lebih mementingkan kesejahteraannya sendiri dan melalaikan kepentingan masyarakat umum sehingga pemerintah daerah sebagai agen yang menyelenggarakan kepentingan publik memiliki kepentingannya tanpa menghiraukan kepentingan publik (Trisnawati & Achmad, 2013). Masyarakat yang bertindak sebagai pengawas pemerintah berhak memperoleh pelayanan dan mendapatkan informasi secara terbuka dari pemerintah daerah. Salah satu cara untuk meminimalisir konflik kepentingan adalah pemerintah wajib untuk mempublikasikan informasi publik secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Mardiasmo (2002) dalam Putri & Arza (2019) menjelaskan bahwa dalam melakukan pengelolaan keuangan publik, pemerintah mendapatkan tekanan dari masyarakat atau *stakeholder* sehingga diperlukan adanya pertanggungjawaban. Masyarakat yang bertindak sebagai pengawas pemerintah berhak memperoleh pelayanan dan mendapatkan informasi secara terbuka dari pemerintah daerah.

Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini diharapkan mampu mengurangi konflik antara pihak yang berkepentingan. Dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat menjadi bukti pelaporan kinerja oleh agen kepada prinsipal sehingga informasi tersebut dapat digunakan masyarakat untuk menilai dan mengawasi kinerja pemerintahan daerah dalam menjalankan mandat yang telah diberikan.

Teori agensi berkaitan dengan variabel bebas yang akan digunakan dalam penelitian ini. Variabel demokrasi berkaitan dengan teori agensi, karena dalam negara demokrasi, masyarakat (prinsipal) memiliki hak dan kebebasan untuk memperoleh informasi mengenai jalannya pemerintahan sehingga pemerintah (agen) dituntut untuk melakukan keterbukaan informasi untuk memenuhi kewajibannya. Masyarakat yang memperoleh lebih banyak informasi akan memiliki kemampuan ikut serta yang lebih baik dalam proses demokrasi.

Dalam hal kekuatan politik, pemerintah (agen) mungkin memiliki kepentingan sendiri yang tidak selalu memaksimalkan kesejahteraan masyarakat (prinsipal). Alt *et al.*, (2001) dalam Guillamón *et al.*, (2011) menyarankan dua cara untuk mengurangi masalah asimetri informasi antara masyarakat dan pemerintah dengan menginformasikan pemilih (masyarakat) tentang tindakan yang diambil oleh politisi terpilih dan memfasilitasi koordinasi hasil anggaran berimbang antara pihak-pihak yang berkuasa. Transparansi yang lebih tinggi dapat mengurangi asimetri informasi sehingga dapat memecahkan masalah keagenan.

Ukuran pemerintah daerah yang besar akan mengakibatkan pemda akan memperoleh pengawasan yang lebih ketat dari berbagai pihak termasuk masyarakat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah mendapat banyak tekanan dari masyarakat untuk mempublikasikan informasi publik sebagai bentuk keterbukaan (transparansi). Pernyataan tersebut berkaitan dengan teori agensi, dimana pemerintah (agen) dituntut untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan kehendak masyarakat (prinsipal) selaku pemberi wewenang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa baik variabel dependen yaitu transparansi pemerintah daerah dan variabel dependen yang terdiri atas demokrasi, kekuatan politik, serta ukuran pemerintah daerah memiliki kaitan yang erat dengan teori agensi. Dalam hal ini, penyediaan informasi publik yang dapat diakses tentang pemerintah daerah merupakan hak masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak berhak untuk menentukan jumlah dan jenis informasi apa yang harus diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, dalam penelitian ini transparansi oleh pemerintah daerah diperlukan sebagai pemenuhan hak masyarakat dan bukan hak istimewa dalam kerangka prinsipal-agen.

2. Sistem Pemerintahan di Indonesia

Sejak diberlakukannya otonomi daerah oleh pemerintah pusat, sekarang pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Urusan pemerintah yang sebelumnya

sebagian besar diatur oleh pemerintah pusat, maka setelah adanya otonomi daerah urusan pemerintah pusat tersebut dilimpahkan kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya di dalam sistem serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbagi ke dalam daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut kemudian dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota.

Di dalam pemerintah daerah terdapat kepala daerah dan perangkat daerah lainnya yang dianggap sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah merupakan badan eksekutif yang memiliki kewajiban menyusun dan menyampaikan anggaran untuk disetujui oleh DPRD, lalu melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme pilkada. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, prosedur dan mekanisme pilkada saat ini lebih menggambarkan implementasi demokrasi. Dengan adanya pilkada, maka

rakyat dapat melakukan pemilihan secara langsung. Pemilihan langsung kepala daerah juga terbuka untuk calon independen atau non parpol untuk maju dengan bergabung bersama partai politik yang akan melalui proses penyaringan bakal calon secara terbuka, setiap partai politik harus mengumumkan proses dan hasil penyaringannya kepada publik.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya, pemerintah daerah memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya sesuai dengan undang-undang. Hubungan tersebut dapat dalam bentuk hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan pemanfaatan sumber daya lainnya.

3. Transparansi

Transparansi berarti dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang bersifat material secara berkala kepada pihak berkepentingan, salah satunya masyarakat. Secara umum, transparansi adalah pengungkapan informasi yang relevan secara tepat waktu dan sistematis (Krah & Mertens, 2020). Dengan adanya prinsip transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui dan memperoleh akses informasi tentang pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan.

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa publik mempunyai hak terhadap pemerintah dalam hal transparansi, yaitu: (1) hak untuk mengetahui (*right to know*) yang artinya publik berhak untuk mengetahui kebijakan pemerintah dan alasan mengapa suatu kebijakan dilakukan, (2) hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) yakni hak untuk diberi

penjelasan secara terbuka mengenai permasalahan yang menjadi perdebatan publik, dan (3) hak untuk didengar (*right to be heard and to be listened to*). Kemudahan dalam memperoleh informasi yang diperlukan oleh publik merupakan landasan dibangunnya transparansi. Oleh sebab itu, informasi harus disampaikan secara terbuka jika berkaitan dengan kepentingan publik.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaporan informasi oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa setiap informasi publik harus bersifat terbuka, dapat diakses oleh pengguna dengan cepat, tepat waktu, hemat biaya, dan cara yang sederhana. Di dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh berbagai macam informasi publik yang tetap berpedoman kepada UU KIP.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dijalankan oleh sebuah lembaga yang disebut Komisi Informasi. Komisi ini melakukan evaluasi melalui penilaian saat sosialisasi, kuesioner penelitian transparansi, monitoring dan evaluasi, ataupun melalui kunjungan dengan mendatangi langsung masing-masing badan publik. Penilaian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana penerapan UU KIP telah dilaksanakan oleh badan publik salah

satunya melakukan penilaian terhadap pemerintah daerah provinsi dalam memberikan layanan informasi publik.

Styles & Tennyson (2007) berpendapat bahwa pemerintah daerah dapat melakukan transparansi informasi kepada publik melalui *internet*, yaitu melalui *website* resmi yang dimiliki masing-masing pemerintah daerah. Dengan dipublikasikan melalui *website*, Styles & Tennyson (2007) mengatakan bahwa hal ini adalah cara yang paling baik dan *cost effective* bagi pihak pemerintah. Laporan keuangan daerah adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan. Pelaporan keuangan dapat digunakan sebagai tolok ukur bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintahan daerah mereka.

4. Demokrasi

Demokrasi memiliki arti yang berbeda oleh setiap orang dan dapat ditinjau dari perspektif ekonomi, sosial, komunitarian, dan politik (Rahman, 2014). Sementara demokrasi politik berkaitan dengan proses pemerintahan dalam suatu negara. Dalam penelitian ini, demokrasi dikaji dari perspektif politik. Dengan demikian, demokrasi adalah sistem politik di mana lembaga pemerintahan seperti eksekutif dan legislatif diisi melalui proses pemilihan umum (pemilu).

Demokrasi berasal dari kata *demos* dan *kratos* yang berarti pemerintahan dari, untuk, oleh rakyat. Amin Rais (1986) dalam Irawan (2016) mengartikan demokrasi sebagai dasar hidup bernegara yang

memberikan pengertian bahwa rakyat memberikan ketentuan dalam masalah pokok tentang kehidupannya termasuk menilai kebijakan pemerintah negara karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian, demokrasi merupakan pemerintahan yang penyelenggaraannya dilakukan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat.

Dalam negara demokrasi, kekuasaan harus dibagi ke dalam tiga lembaga negara, yaitu lembaga legislatif atau di Indonesia dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), lembaga eksekutif yaitu Presiden, Wakil Presiden, dan Para Menteri, serta lembaga yudikatif yang memiliki kekuasaan untuk mengadili kasus pelanggaran undang-undang.

Konsep demokrasi terus mengalami perubahan dan perkembangan. Sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia telah membuktikan bahwa demokrasi tidak selamanya dilaksanakan sesuai dengan konstitusi. Hal ini dapat dilihat dari pergantian sistem demokrasi di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga lahirnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, hingga munculnya reformasi memperlihatkan bahwa peran pemerintah masih mendominasi dalam penerapan sistem demokrasi di Indonesia, sementara rakyat terpaksa mengikuti kemauan penguasa dalam menjalankan demokrasi (Irawan, 2016).

5. Kekuatan Politik

Pencalonan kepala daerah tidak terlepas dari partai politik yang mendukungnya. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam pasal 40 ayat 1 menyatakan bahwa seluruh calon kepala daerah yang berhak maju dalam pertarungan harus dicalonkan partai politik tertentu.

Partai politik dibentuk guna mempengaruhi jalannya pemerintahan dengan mengajukan calon-calon untuk jabatan publik termasuk kepala daerah. Wujud nyata partai politik dalam menghasilkan kandidat untuk didelegasikan sebagai pemimpin adalah keikutsertaannya dalam pilkada. Pilkada digunakan oleh partai politik dalam bersaing dengan partai politik lainnya untuk mendapat kekuasaan lokal (Pranaswati & Kiswanto, 2020).

Strategi-strategi politik yang diterapkan oleh partai politik harus merupakan strategi yang tepat. Salah satu kunci keberhasilan dan tingkat keyakinan tinggi akan menangnya sebuah partai politik dalam laga pilkada kepala daerah adalah tingkat pendukung dan konsentrasi suara.

Di Indonesia sistem yang dianut adalah sistem banyak partai, sehingga tidak ada partai yang memiliki suara mayoritas. Dengan menganut sistem multi partai, maka akan terbentuk koalisi dan oposisi untuk mengurangi tingkat persaingan dalam pilkada.

Penggabungan partai politik atau koalisi tersebut biasanya atas dasar tujuan politik dan pandangan politik yang sama sehingga 2 sampai 3 partai dapat mendukung 1 calon yang sama. Kepala daerah yang didukung oleh banyak partai memiliki suara dan pendukung yang banyak juga sehingga kekuatan politiknya akan meningkat. Besarnya partai pendukung kepala daerah maka menunjukkan semakin tinggi minat masyarakat untuk mengetahui kinerja mereka. Tuntutan tersebut menyebabkan masyarakat memerlukan informasi yang mendorong terjadinya transparansi yang lebih besar.

6. Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah yang besar menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki jumlah dan transfer kekayaan yang besar pula, oleh karena itu masyarakat akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemerintahan daerah. Pemerintah daerah yang besar juga lebih kompleks dalam melakukan pengelolaan terhadap keuangan, sehingga untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi maka informasi keuangan yang harus dilaporkan juga semakin banyak. Pemerintah daerah dengan ukuran yang besar akan mendapat tekanan

besar dari publik dalam menyajikan laporan keuangannya sebagai langkah dalam meningkatkan transparansi.

Harahap (2019) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah dapat diukur dengan berbagai cara, yaitu jumlah karyawan, jumlah aset, ukuran kapasitas, dan tingkat produksi. Semakin banyak sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah maka semakin besar kemungkinan pemerintah daerah untuk melakukan investasi dalam sistem infrastruktur yang akan memberikan transparansi (Piotrowski & Van Ryzin, 2007). Penelitian yang dilakukan oleh Nosihana & Yaya (2016), Trisnawati & Achmad (2013), Puspita & Martani (2013) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi pemerintah daerah.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul & Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Democracy and Financial Transparency of Local Governments in Sub-Saharan Africa Peneliti: Krah & Mertens (2020)	Variabel Independen: Demokrasi, Ideologi Politik, dan Ukuran Pemerintah Daerah Variabel Dependen: Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah	1. Demokrasi, Ideologi Politik, dan Ukuran Pemerintah Daerah memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap tingkat transparansi keuangan pemerintah daerah

2.	<p>Determinants of Local Governments' Transparency in Times of Crisis: Evidence from Municipality-Level Panel Data</p> <p>Peneliti: Tejedro-Romero & de Araujo (2015)</p>	<p>Variabel Independen: Investasi, Tekanan Fiskal, Tingkat Pengangguran, Jenis Kelamin, Jumlah Pemilih, Kekuatan Politik</p> <p>Variabel Dependen: Tingkat Transparansi Pemerintah Daerah</p>	<p>1. Tingkat Pengangguran, Jenis Kelamin, Jumlah Pemilih, dan Kekuatan Politik terhadap Tingkat Transparansi Pemerintah Daerah</p> <p>2. Investasi dan Tekanan Fiskal tidak berpengaruh terhadap Tingkat Transparansi Pemerintah Daerah</p>
3.	<p>Transparency of Local Government in Indonesia</p> <p>Peneliti: Adiputra <i>et al.</i>, (2018)</p>	<p>Variabel Independen: Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit, Tingkat Respon Pemerintah Daerah, Lingkungan Politik</p> <p>Variabel Dependen: Transparansi Pemerintah Daerah di Indonesia</p>	<p>1. Opini Audit dan Lingkungan Politik berpengaruh positif terhadap transparansi pemerintah daerah</p> <p>2. Ukuran Pemerintah Daerah dan Respon Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah</p>
4.	<p>Determinants of Internet Financial Disclosure in GCC Countries.</p> <p>Peneliti: Basuony & Mohamed (2014)</p>	<p>Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Tipe</p>	<p>1. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Internet</i></p>

		Industri, Kualitas Audit Variabel Dependen: <i>Internet Financial Reporting</i> di Perusahaan GCC	<i>Financial Reporting</i> 2. Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Tipe Industri, dan Kualitas Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Internet Financial Reporting</i>
5.	The Determinants of Web-Based Corporate Reporting in France. Peneliti: Boubaker <i>et al.</i> , (2012)	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan, Profitabilitas, Kualitas Audit, <i>Leverage</i> , Tipe Industri, Penerbitan Saham Variabel Dependen: Pelaporan Berbasis Web di Prancis	1. Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan, Profitabilitas, Kualitas Audit, Tipe Industri dan Penerbitan Saham berpengaruh positif terhadap Pelaporan Berbasis Web di Prancis 2. Profitabilitas dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Pelaporan Berbasis Web di Prancis
6.	The Institutional, Economic, and Social Determinants of Local Government Transparency Peneliti: del Sol (2013)	Variabel Independen: Ukuran Pemerintah Daerah, Jenis Kelamin, <i>Leverage</i> , Ideologi Politik, Jumlah Pemilih.	1. Ukuran Pemerintah Daerah dan Ideologi Politik berpengaruh terhadap Transparansi Pemerintah Daerah

		Variabel Dependen: Transparansi Pemerintah Daerah	
7.	Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities Peneliti: Laswad <i>et al.</i> , (2005)	Variabel Independen: Kompetisi Politik, Ukuran Pemerintah Daerah, <i>Leverage</i> , Kekayaan Pemerintah Daerah, Visibilitas Pers, Tipe <i>Council</i> Variabel Dependen: Pelaporan Keuangan di <i>Internet</i> secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah	1. <i>Leverage</i> , Kekayaan Pemerintah Daerah, Visibilitas Pers, dan Tipe <i>Council</i> berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pemda secara sukarela melalui internet. 2. Kompetisi Politik dan Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pemda melalui internet.
8.	Penentu Transparansi Pemerintah Daerah: Sebuah Studi pada Pemerintah Daerah di Indonesia Peneliti: Muhtar <i>et al.</i> , (2017)	Variabel Independen: Rasio Lansia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Derajat Desentralisasi Fiskal, <i>Leverage</i> , Ideologi, Tingkat Kemenangan Kepala Daerah, Tingkat Pengangguran,	3. Derajat Desentralisasi Fiskal, <i>Leverage</i> , Ideologi, Tingkat Pengangguran, dan Aktivitas Ekonomi berpengaruh positif terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia.

		<p>dan Aktivitas Ekonomi</p> <p>Variabel Dependen: Transparansi Pemerintah Daerah di Indonesia</p>	<p>4. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Kemenangan Kepala Daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia.</p>
9.	<p>Transparansi Informasi Pemerintah Daerah Melalui Website: Faktor Politik atau Keuangan?</p> <p>Peneliti: Sutaryo & Tri Amanu (2020)</p>	<p>Variabel Independen: Profil Kepala Daerah, Ideologi Politik, Kompetisi Politik, Likuiditas Daerah, Kemandirian Daerah</p> <p>Variabel Dependen: Tingkat Transparansi Informasi melalui <i>Website</i> Pemerintah Daerah</p>	<p>1. Profil kepala daerah, kompetisi politik, dan kemandirian daerah berpengaruh terhadap tingkat transparansi informasi pemerintah daerah.</p> <p>2. Ideologi politik dan likuiditas daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat transparansi informasi pemerintah daerah</p>
10.	<p>Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia</p> <p>Peneliti: Nosihana & Yaya (2016)</p>	<p>Variabel Independen: Kompetisi Politik, Ukuran Pemda, Rasio Pembiayaan Utang (<i>Leverage</i>), Kekayaan Pemda, Tipe</p>	<p>1. Kompetisi Politik, Ukuran Pemda, <i>Leverage</i>, Kekayaan Pemda, Tipe Pemda dan Opini Audit dapat mempengaruhi internet</p>

		<p>Pemda, dan Opini Audit.</p> <p>Variabel Dependen: Pengungkapan IFR melalui e-Government</p>	<p>financial reporting pada website tiap Pemda di Indonesia.</p> <p>2. Rasio Pembiayaan Utang (<i>Leverage</i>), Kekayaan Pemda, Tipe Pemda dan Opini Audit tidak memiliki bukti mempunyai pengaruh signifikan terhadap internet financial reporting melalui e-government.</p>
11.	<p>Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan dan Keteraksesan <i>Internet Financial Reporting</i> oleh Pemerintah Daerah</p> <p>Peneliti: Wau & Ratmono (2015)</p>	<p>Variabel Independen: Kompetisi Politik, Ukuran Pemda, Rasio Kemandirian Finansial, Pendapatan per Kapita, dan Opini Audit.</p> <p>Variabel Dependen: Ketersediaan IFR dan Keteraksesan IFR.</p>	<p>1. Pendapatan per Kapita dan Opini memiliki pengaruh terhadap ketersediaan IFR oleh pemerintah daerah, sedangkan Kompetisi Politik, Ukuran Pemerintah Daerah dan Kemandirian Finansial Pemda tidak berpengaruh terhadap ketersediaan IFR oleh</p>

			<p>pemerintah daerah.</p> <p>2. Kemandirian Finansial Pemda memiliki pengaruh terhadap keteraksesan IFR pada website pemerintah daerah, sedangkan Kompetisi Politik, Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan per Kapita dan Opini Audit tidak berpengaruh terhadap keteraksesan IFR pada website pemerintah daerah.</p>
--	--	--	--

C. Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh demokrasi, kekuatan politik, serta ukuran pemerintah daerah terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia.

1. Pengaruh Demokrasi

Rachmiate *et al.*, (2013) menjelaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat di dunia, informasi adalah suatu hal yang penting terutama bagi kita yang tinggal di negara yang menganut sistem demokrasi yang menyatakan bahwa rakyat memiliki hak atas kebebasan memperoleh

informasi. Dari segi penyelenggaraan pemerintah jika kebebasan dalam memperoleh informasi bersifat tertutup maka akan mengakibatkan munculnya pemerintahan yang tidak demokratis dan otoriter.

Teori agensi menjelaskan bahwa pemerintah daerah yang bertindak sebagai agen harus menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat yang bertindak sebagai prinsipal. Dalam penyelenggaraan demokrasi, pemerintah (agen) wajib untuk menyampaikan informasi secara terbuka karena masyarakat (prinsipal) memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai jalannya pemerintahan.

Keterbukaan informasi dalam pelaksanaan pemerintahan merupakan wujud pemerintahan dalam mengimplementasikan *good governance*, dimana salah satu prinsip *good governance* yaitu adanya transparansi pemerintahan kepada masyarakat. Masyarakat yang memperoleh lebih banyak informasi akan memiliki kemampuan ikut serta yang lebih baik dalam proses demokrasi (Rachmattie *et al.*, 2013).

Penelitian Krah & Mertens (2020) membuktikan bahwa demokrasi secara signifikan mampu meningkatkan transparansi, hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa ketika demokrasi tumbuh di suatu negara, transparansi oleh pemerintah daerah akan meningkat. Oleh karena itu, transparansi di pemerintah daerah dapat ditingkatkan dengan memperdalam budaya demokrasi di tanah air. Selain itu, ketika tingkat transparansi pemerintah daerah tinggi maka akan lebih mudah untuk mengungkapkan

kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H1: Demokrasi berpengaruh positif terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia

2. Pengaruh Kekuatan Politik

Pencalonan kepala daerah tidak lepas dengan partai politik yang mendukungnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 40 ayat 1 yang menyatakan bahwa semua calon yang berhak maju dalam pertarungan harus dicalonkan partai politik tertentu. Partai politik dibentuk guna mempengaruhi jalannya pemerintahan dengan mengajukan calon-calon untuk jabatan publik termasuk kepala daerah. Salah satu kunci keberhasilan dan tingkat keyakinan tinggi akan menangnya sebuah partai politik dalam pilkada adalah tingkat pendukung dan konsentrasi suara

Dalam teori agensi, kurangnya transparansi dapat menciptakan keuntungan bagi pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan mereka (Guillamón *et al.*, 2011). Pemerintah (agen) mungkin memiliki kepentingan sendiri yang tidak selalu memaksimalkan kesejahteraan masyarakat (prinsipal). Alt *et al.*, (2001) dalam Guillamón *et al.*, (2011) menyatakan bahwa transparansi mampu mengurangi asimetri informasi diantara agen politik, pasar keuangan, dan pemilih (masyarakat). Dalam penelitiannya, mereka menyarankan dua cara untuk mengurangi masalah tersebut yaitu dengan menginformasikan pemilih (masyarakat) tentang tindakan yang diambil oleh politisi terpilih dan memfasilitasi koordinasi hasil anggaran

berimbang antara pihak-pihak yang berkuasa. Transparansi yang lebih tinggi dapat mengurangi asimetri informasi sehingga dapat memecahkan masalah keagenan.

Dalam penelitiannya Tejedo-Romero & de Araujo (2015) menemukan bahwa kekuatan politik berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah. Indonesia saat sekarang telah menganut sistem multipartai, dimana terdapat banyak partai dan tidak hanya satu partai saja yang berkuasa sehingga tidak ada partai yang memiliki suara terbanyak. Berdasarkan hal tersebut menyebabkan terbentuknya koalisi dan oposisi. Semakin besar partai yang mendukung kepala daerah, maka akan semakin tinggi pula minat masyarakat terhadap kinerja mereka. Hal ini akan menimbulkan tuntutan dari masyarakat, di mana masyarakat mengharapkan informasi yang lebih baik sehingga mendorong adanya keterbukaan informasi yang lebih besar pula (Sutaryo & Tri Amanu, 2020). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Kekuatan politik berpengaruh positif terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia

3. Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah dapat dilihat dari seberapa besar aset yang dimiliki oleh suatu daerah. Semakin besar aset yang dimiliki menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tersebut juga semakin besar. Araujo dan Tejedo-Romero (2016) berpendapat bahwa pemerintah yang besar mungkin mendapat banyak tekanan dari masyarakat karena sumber

daya yang cukup besar tersedia bagi mereka. Dalam teori agensi, terciptanya kondisi ini menyebabkan masyarakat melakukan pengawasan yang lebih ketat karena khawatir terjadinya penyelewengan dana. Dalam upaya mengurangi asimetri informasi terhadap masyarakat yang berprasangka buruk, maka pemerintah perlu mengungkapkan informasi pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahannya sehingga terciptalah transparansi oleh pemerintah daerah.

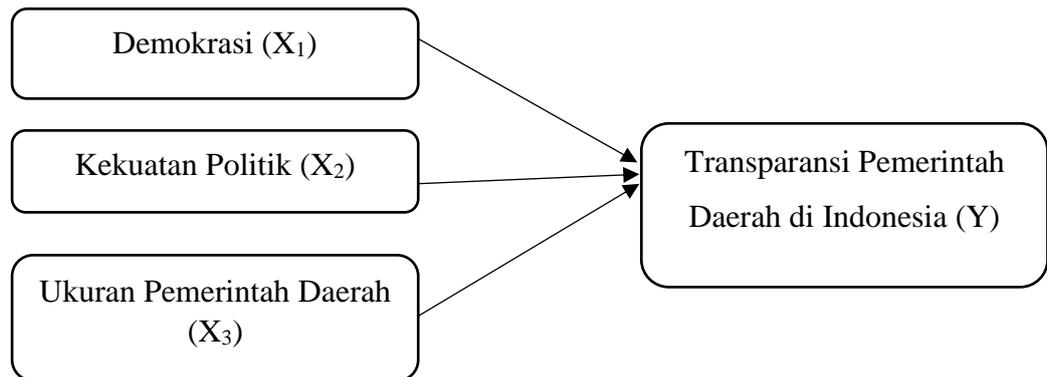
Pengaruh positif dari ukuran pemerintah daerah terhadap transparansi telah dikonfirmasi oleh banyak penelitian seperti pada penelitian Araujo dan Tejedo-Romero (2016). Penelitian Nosihana & Yaya (2016) dan Trisnawati & Achmad (2013) juga membuktikan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap publikasi laporan keuangan. Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka kinerja keuangan diharapkan dapat semakin baik yang ditunjukkan melalui keterbukaan informasi publik (transparansi). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H3: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia

D. Kerangka Konseptual

Dari uraian di atas, kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Konseptual



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh demokrasi, kekuatan politik, dan ukuran pemerintah daerah terhadap transparansi pemerintah daerah provinsi di Indonesia tahun 2018-2020. Penelitian ini menggunakan *total sampling* dalam pengambilan sampel. Objek penelitian ini pada seluruh pemerintah provinsi di Indonesia pada tahun anggaran 2018-2020 dengan jumlah sampel sebanyak 99 sampel penelitian. Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Demokrasi berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan demokrasi berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi demokrasi maka akan meningkatkan transparansi pemerintah daerah guna sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada masyarakat.
2. Kekuatan politik tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Oleh sebab itu, hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan kekuatan politik berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia ditolak.

3. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Semakin besar ukuran pemerintah daerah, maka transparansi pemerintah daerah provinsi juga semakin meningkat. Sehingga hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia diterima.

B. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian yaitu:

1. Peneliti hanya menggunakan objek penelitian dari jumlah provinsi di Indonesia tahun 2018-2020 dengan sampel sebanyak 99 pemerintah provinsi.
2. Keterbatasan dalam memperoleh data transparansi pemerintah daerah provinsi di Indonesia karena publikasi hasil monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi yang tidak lengkap untuk tahun 2019.
3. Keterbatasan dalam memperoleh laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) karena tidak semua pemerintah provinsi mempublikasikannya di *website* pemda masing-masing sehingga sulit untuk menemukan data total aset untuk mengukur variabel ukuran pemerintah daerah.
4. Koefisien determinasi pada penelitian ini hanya mampu menerangkan pengaruh variabel demokrasi, kekuatan politik, dan ukuran pemerintah daerah sebesar 37,9%. Hal ini menunjukkan bahwa masih

banyak variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah.

C. **Saran**

Adapun saran peneliti dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagi pihak pemerintah provinsi
 - a. Berdasarkan tabulasi data yang dilakukan peneliti pada pemerintah provinsi di Indonesia menemukan fakta bahwa memang pemerintah provinsi sudah mengungkapkan informasi keuangan. Namun, masih banyak provinsi yang tidak memuat semua pelaporan keuangan secara keseluruhan pada *website* resmi pemerintah daerah provinsi masing-masing dan lemahnya keteraksesan informasi. Lemahnya keteraksesan informasi yang kadang terjadi ialah *server website yang down, website sedang dalam perbaikan*, tidak adanya menu “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” dalam *website* pemerintah provinsi. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat mengevaluasi hasil, prosedur dan kebijakan terkait transparansi laporan keuangan dalam pemerintah provinsi tersebut guna mempermudah akses oleh pengguna laporan keuangan
 - b. Untuk variabel ukuran pemerintah daerah yang memerlukan data laporan keuangan, maka sebaiknya pemerintah daerah lebih konsisten dalam mempublikasi laporan keuangan daerah pada *website* pemerintah provinsi setiap tahun dan mempublikasikan

laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Ditemukan di beberapa *website* provinsi yang tidak memuat laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun sebelumnya, atau belum mempublikasikan laporan keuangan di *website* resmi pemerintah daerah.

2. Bagi Komisi Informasi Pusat
 - a. Mempublikasikan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik secara lengkap berdasarkan kategori yang telah ditetapkan yaitu tidak informatif, kurang informatif, cukup informatif, menuju informatif, dan informatif serta menuliskan nilai transparansinya.
3. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan sampel penelitian pada pemerintah kabupaten/kota yang ada di Indonesia agar dapat lebih representatif dalam menggambarkan transparansi pemerintah daerah dalam unit yang berbeda-beda.
 - b. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang agar mengetahui bagaimana pengaruhnya dalam beberapa tahun.